

Rasionalitas Dan Modernisasi Ekonomi Politik di Aras *Civil Society*

Nurul Azizah

Lecturer at IAI Ibrahimy Situbondo
azizah.hf14@gmail.com

Abstract

The following article depicts the impact of the implementation of modernization of rural economic-politic (system) in the new order era towards its natural resources, which had put them, the peasant community, in disadvantaged position, especially those belong to the poor group of civil society, since they prioritized more on the preservation of the foreign investments which at the end led to the issue of the maintaining the status quo of the new order regime and their political interests; as well as illustration of the rural renewal strategy.

Keyword: economic modernization and rationalizations, rural politic, civil society, new order era

Abstrak

Artikel berikut menggambarkan dampak dari pelaksanaan modernisasi pedesaan ekonomi-politik (sistem) di era orde baru terhadap sumber daya alam, yang telah menempatkan mereka, komunitas petani, dalam posisi yang kurang beruntung, terutama yang termasuk dalam kelompok miskin masyarakat sipil, karena mereka diprioritaskan lebih pada pelestarian investasi asing yang pada akhirnya menyebabkan isu mempertahankan status quo rezim orde baru dan kepentingan politik mereka; serta ilustrasi dari strategi pembaharuan pedesaan.

Kata kunci: modernisasi ekonomi dan rasionalisasi, desa politik, masyarakat sipil, orde baru era

Pendahuluan

Rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik menjadi salah satu point penting komitmen ekonomi politik para pemimpin dunia, dalam pertemuan puncak World Food Summit: five years Later(WFS: fly) di Roma Italia, pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2002 lalu (Sahdan, 2003: 37).

Sekitar 183 negara dari berbagai penjuru dunia, yang tergabung dalam Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), bertekad memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan jalaan rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik bagi civil society di pedesaan (Sahdan, 2003: 37).

FAO juga memusatkan perhatian pada civil society di pedesaan, karena hamper 70 % dari total penduduk dunia yang mengalami kemiskinan berada di Negara berkembang dan terbelakang dan sebagian penduduknya berprofesi

sebagai petani dan sekitar 817 juta jiwa diantaranya menderita rawan pangan, kekurangan gizi, dan bahkan tidak memiliki daya tahan untuk hidup (Kompas, 28 Juni 2014).

Di Indonesia, yang termasuk salah satu Negara tempat modernisasi ekonomi politik yang luar biasa dijalankan di bawah pemerintahan orde baru, menampilkan bekerjanya sistem dan modal yang mencengkeram masyarakat. tampaknya modernisasi ekonomi politik yang dijalankan selama masa orde baru hanya menghasilkan peningkatan kemiskinan di aras civil society daerah pedesaan. Meluasnya kondisi kekurangan gizi dikalangan anak-anak dan balita dan menghasilkan rawan pangan di pedesaan. Sistem dan cara tradisional yang dipaksa di gantikan dengan sistem dan cara modern di era orde baru melalui kebijakan Revolusi Hijau tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, serta tidak dapat menunjukkan perubahan kesejahteraan bagi civil society di aras pedesaan.

Tulisan ini ingin menjawab berbagai persoalan; pertama, bagaimana proses rasioanalitas dan modernisasi ekonomi politik selama ini yang telah menciptakan ketergantungan desa kepada kota; Kedua, bagaimana proses modernisasi ekonomi politik itu dilakukan sehingga menempatkan desa sebagai kawasan yang miskin, terbelakang, dan marjinal dibanding dengan perkotaan; ketiga, mengapa ekspansi kekuasaan (*political power*) dan modal (kekayaan) merenggut seluruh hajat hidup *civil society* di pedesaan.

Tujuan dari penulisan ini adalah; pertama, mengetahui bagaimana proses rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik *civil society* di aras pedesaan yang terjadi selama ini; kedua, mengetahui mengapa modernisasi ekonomi politik di Indonesia menciptakan ketergantungan desa terhadap kota; ketiga, mengetahui bagaimana rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik pedesaan yang selaras dengan keutuhan *civil society* (masyarakat) desa itu sendiri.

Kerangka Teori

Modernisasi Ekonomi Politik adalah merupakan sebuah proses yang melibatkan bangsa-bangsa. Manifestasi dari proses ini pertama kali nampak di Inggris pada abad ke-18 yang disebut dengan Revolusi Industri sejak itu modernisasi meluas. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern (Armer &

Katsillis, 1 Mei 2014). Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20 (Armer & Katsillis, 1 Mei 2014). Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan budaya (Armer & Katsillis, 1 Mei 2014). Masyarakat modern adalah masyarakat industri (www.britannica.com/modernizations). Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi (www.wikipedia.com/teory of modernizations).

Teori modernisasi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama (1950-an dan 1960-an), fase kedua (1970-an dan 1980-an), fase ketiga (1990-an). Teori modernisasi lahir sebagai sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia II, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia dimana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia (Afrika dan Amerika Latin) (Suwarsono, 1991: 95-204). Terdapat dua teori yang melatarbelakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme.

Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam dua hal ((Suwarsono, 1991: 95-204). Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah, seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju, Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia (Suwarsono, 1991: 95-204) Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas, demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat.

Pemikir klasik teori modernisasi dikemukakan oleh tiga pemikir klasik teori modernisasi untuk menggambarkan bagaimana seorang sosiolog, ekonom dan ahli politik menguji persoalan pembangunan di Negara Dunia Ketiga (www.wikipedia.com/teory of modernizations).

Pertama, menurut Neil Smelser, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus (www.wikipedia.com/teory of modernizations).

Kedua, Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa ada lima tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, tinggal landas, menuju kematangan dan konsumsi massa. Namun, masalah yang dihadapi Negara Dunia Ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Menurut Rostow, masalah dana investasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional dan investasi langsung modal asing (www.wikipedia.com/teory of modernizations).

Ketiga, menurut James S. Coleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Terdapat tiga hal pokok yang dinyatakan oleh Coleman, yaitu diferensiasi politik dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik (Suwarsono, 1991: 95-204).

Tahapan modernisasi menurut Walt Whitman Rostow mengidentifikasi bahwa ada lima tahapan dalam modernisasi, yaitu (Mantuhu, 2011). (1) Masyarakat tradisional: tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter; (2) Persiapan untuk tinggal landas: tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahapan ini pada akhirnya mendorong adanya investasi; (3) Tinggal landas: pada tahapan ini terjadi

peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur; (4) Menuju kematangan: pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor; (5) Konsumsi massa: pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi.

Terdapat dua asumsi dalam teori modernisasi ([www.wikipedia.com/teory of modernizations](http://www.wikipedia.com/teory_of_modernizations)). Pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap, proses homogenisasi, terbentuk sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif dan memerlukan waktu panjang. Sementara itu, berdasarkan teori fungsionalisme modernisasi merupakan proses sistematis, proses transformasi dan proses yang terus-menerus.

Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti negara Dunia Ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan Negara Dunia Ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan Negara Dunia Ketiga. Oleh karena itu, jika Negara Dunia Ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat.

Kritik terhadap teori modernisasi di angkat oleh Daniel Lerner yang menyatakan bahwa teori modernisasi melupakan sejarah yang terjadi pada Negara Dunia Ketiga (Bernstein, t.th.). Dalam sejarahnya, Negara Dunia Ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, Negara Dunia Ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di Negara Dunia Pertama (negara Barat). Akan tetapi, proses Negara Dunia Pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang (Bernstein, t.th.).

Modernisasi Ekonomi Politik di Indonesia.

Modernisasi ekonomi politik di Indonesia, sudah dirintis sejak masa kolonial. Sistem tanam paksa atau yang kita kenal dengan kerja rodi dan romusa yang dijalankan sejak masa colonial Belanda jauh sebelum Indonesia lahir sebagai nation state, bisa dinilai sebagai fase bekerjanya sistem modernisasi itu. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistem tanam paksa yang dijalankan kolonial Belanda sebagai model masuknya modernisasi ekonomi politik di Indonesia dapat dilihat dari cara pemerintah colonial memaksa petano menanam sejumlah tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan industry dan investassi modal (Lindblad, 2002).

Sejumlah areal tanah di pedesaan diambil alih oleh pemerintahan colonial Belanda dan dipaksa untuk ditanami tanaman tertentu seperti tebu dan the semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri (modal). Sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah colonial Belanda juga mendorong perubahan fungsi petani pedesaan.

Para petani yang sebelum sistem tanam paksa diselenggarakan, berfungsi sebagai pekerja yang menyediakan kebutuhannya sendiri berubah menjadi buruh pabrik yang bekerja untuk kepentingan industry. Ini merupakan babak awal peralihan petani Indonesia dari petani yang beekerja di sector domestic untuk kepentingan keluarga berubah menjadi buruh pabrik yang menyediakan kebutuhan industry dan perdagangan pemerintah colonial.

Para petani dieksploitasi tidak hanya tenaga fisiknya, tetapi juga lahan pertaniannya yang dijadikan sebagai jaminan bagi kepentingan industri dan pabrik pemerintah colonial, pengusaha barat mulai merampas dan menyewa tanah-tanah pedesaan untuk ditanami tanaman industri. *Woeste gronden* (bahasa Belanda yang artinya tanah-tanah yang tidak digunakan) merupakan sebutan halus bagi pemerintah colonial untuk mengambil paksa tanah-tanah petani guna menghindari terjadinya keributan, pemberontakan, dan perlawanan yang dilakukan oleh petani yang tanahnya diambil paksa oleh pemerintah colonial.

Rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik colonial dijalankan juga dengan mendorong pabrik-pabrik agar mencaplok tanah-tanah pertanian di daerah pedesaan dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah *woeste gronden* yang tidak dapat dipergunakan oleh petani pribumi.

Kekuasaan (*political power*) diperlukan untuk melakukan koersi, restriksi, pengawasan dan tekanan atas fisik petani dan memaksa para petani memberikan lahan mereka untuk kepentingan industry sekaligus menciptakan kebungkaman di kalangan petani. Kekuasaan juga diperlukan tidak hanya untuk mengawasi lalulintas ketersediaan tenaga fisik petani untuk melayani kebutuhan pekerjaan di lahan tanam paksa dan pengambil alihan lahan para petani, tetapi juga dalam mengontrol dan mengendalikan munculnya perlawanan dan pemberontakan kaum petani di pedesaan.

Pada masa orde baru, rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik di Indonesia memiliki kecenderungan yang sama dengan modernisasi ekonomi politik yang dilakukan pada masa kolonial Belanda. Sistem dan cara pertanian dipaksakan berubah dari cara dan sistem tradisional ke sistem pertanian modern.

PELITA I orde baru yang meletakkan strategi pembangunannya pada pembangunan pertanian membawa banyak sekali teknologi baru, khususnya teknologi padi ke desa. Pengenalan dan adopsi teknologi ini telah banyak menimbulkan revolusi dalam bidang produksi padi, tetapi juga revolusi dalam bidang pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988: 40).

Perubahan sistem dan cara pertanian yang diperkenalkan pemerintah orde baru bukan bagi peningkatan produktivitas hasil-hasil pertanian dan dengan begitu meningkatkan kesejahteraan hidup para petani, adalah upaya dalam mempersiapkan petani terutama di pedesaan untuk menerima ekspansi modal sebagai jaminan bagi perlindungan kekuasaan Orde Baru. Masuknya modal ke daerah pedesaan dikuasai oleh wiraswasta dan pemodal di Desa. Dengan begitu petani di pedesaan tetap menghadapi persoalan secara hakiki tentang pendapatan dan sempitnya kesempatan kerja (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988: 40).

Modal (kekayaan) dan sumber-sumber material diyakini oleh pemerintah orde baru sebagai instrument yang sangat efektif untuk melestarikan kekuasaan, menumbuhkan loyalitas dan kesetiaan masyarakat dari desa sampai pusat, reward, dan carrot bagi mereka yang loyal, sekaligus sebagai modal untuk membendung pembangkangan, menaaklukkan pemberontakan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk melestarikan kekuasaan dari gempuran massa.

Rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik yang dijalankan di bawah kekuasaan Orde baru, juga dilakukan dengan menerapkan *woeste gronden*. Tanah-tanah pertanian yang subur di daerah pedesaan diambil alih oleh pemerintah dan di cap sebagai tanah milik Negara. Para petani diindoktrinasi agar rela menyerahkan tanah-tanah mereka yang paling subur demi kepentingan Negara. Petani yang tidak rela menyerahkan tanahnya begitu saja dianggap sebagai pembangkang yang tidak setia kepada Negara. Hukumannya adalah dipenjara atau di cap sebagai antek-antek Partai kaomunis Indonesia (PKI). Disamping memaksa petani menyerahkan tanah-tanahnya untuk kepentingan industry, capital, dan kekuasaan, para petani di daerah pedesaan juga di paaksa untuk menanam tanaman industry di atas tanah-tanah mereka. Tebu, the, kopi dan sebagainya merupakan tanaman wajib bagi petaani untuk menggantikan tanaman padi dan jagung yang dianggap paling layak untuk petani di daerah pedesaan. Akibatnya, petani tidak lagi bekerja untuk kepentingan keluarganya melainkan untuk kepentingan industry gula. The dan kopi. Disini eksploitasi petani tidak hanya dilakukan terhadap tanah dan tanaman pertanian, melainkan fissik petani itu juga menjadi korban.

Dalam konteks ekonomi Marxian telah terjadi peralihan fungsi petani. Petani tidak lagi menjadi buruh tani, petani penggarap, dan sebagainya, tetapi telah berubah menjadi petani penggarap tanaman pabrik dan petani penjaga kelestarian industry. Kekuasaan politik dilakukan dengan menekan, menteror, mengintimidasi, mengawasi, merestriksi dan mengkoersi petani. Babinsa merupakan instrument utama kekuasaan Orde Baru yang digunakan untuk itu. Disamping mengawasi petani, instrument kekuasaan Orde Baru ini juga dirancang untuk mengawasi lalu lintas tanaman petani, sehingga bisnis militer berkembang luas dari desa hingga ke kota.

Birokrasi pemerintah Orde Baru dirancang secara rigid, tersentral dan terkendali untuk memudahkan control dan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya pembangkangan yang berasal dari civil society. RT, RW tidak hanya bekerja sebaagai administrator atas kelangsungan usaha borjuasi di daerah pedesaan, tetapi juga sebagai agen kekuasaan yang setiap saat melaporkan perkembangan tertib social dan stabilitas keamanan. RT, RW tidak hanya menjadi agen kekuasaan tetapi juga menjadi agen borjuasi yang menjual pestisida, pupuk urea kepada petani (Antlov. 2002).

Dengan begitu, modernisasi yang digunakan Orde Baru adalah politik segmentasi dan bifrontal seperti yang sering dikemukakan oleh O'Donnel. Strategi bifrontal dipergunakan untuk melakukan proses stasisasi, lewatnya Negara menundukkan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan privatisasi dengan membuka beberapa lembaganya bagi penyampaian kepentingan masyarakat sipil secara terorganisasi.

Strategi segmenter digunakan untuk: (1) memusatkan proses stasisasi masyarakat kelas bawah, (2) memprivatisasikan lembaganya bagi kepentingan kelas atas yang dominan. singkatnya, perwakilan kelas bawah dibatasi, sedangkan perwakilan kelas atas atau dominan diperbolehkan (O'Donnell dalam Mas'ood, 1989: 15).

Dengan demikian rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik yang dijalankan pada masa orde baru digunakan untuk : *Pertama*, memperkokoh kekuasaan orde baru. *Kedua*, menjamin basis material (capital) untuk membayar loyalitas dari sector rakyat. *Ketiga*, memastikan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari sector rakyat. *Keempat*, meminimalkan partisipasi rakyat pedesaan untuk menjamin tertib social, stabilitas keamanan dan roda pembangunan.

Agenda Pembaharuan Desa

Dengan proses rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik seperti yang telah digambarkan diatas, bagaimakah memformulasikan agenda pembaharuan desa ?. mengembalikan otonomi desa, terutama hak-hak ekonomi dan politik rakyat yang selama ini dirampas oleh Negara. Oleh karena itu agendanya adalah memformulasikan kembali ruang-ruang ekonomi yang selama ini digunakan secara keliru untuk kepentingan kekuasaan. Agenda pertama adalah mengembalikan sumber-sumber daya, termasuk tanah yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan Negara. Kedua mengembalikan hak-hak ekonomi politik rakyat; ruang-ruang public yang ada di desa difungsikan kembali dan diisi dengan daya kreasi, inovasi, kebebasan berekspresi dan sebagainya yang khas rakyat pedesaan. Reformulasi strategi ini sangat penting demi menata kembali desa yang selama ini telah menjadi korban berbagai kepentingan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Brabanti, Ralph. 1980. Modernisasi Administrasi Negara. Dalam Weiner, Myron (Ed). *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajdah Madah University Press.
- Mashud, Mustain. 2004. Perubahan Sosial. Dalam Narwoko, J. D. & Suyanto, Bagong (Ed). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Predana Media.
- O'Donnell dalam Mochtar Mas' oed. 1989. *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru 1996-1997*. LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Astrid S. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosiologi*. Jakarta: Binacipta.
- Suwarsono, Alvin Y. So 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan.
- Syarbaini, S., Rusdiyanto. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Weiner, Myron. 1980. Partisipasi Politik dan Perkembangan Politik. Dalam Weiner, Myron (Ed). *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gajdah Madah University Press.
- Widyartono, Didin. 2012. *Bahasa Indonesia Riset*. Malang: UB Press
- J. Michael Armer, John Katsillis. "Modernization Theory". Diakses 1 Mei 2014.
- J. Matunhu. 2011. "A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical assessment". *African Journal of History and Culture*.
- Henry Bernstein. "Modernization Theory and The Sociological Study of Development".
Internet
- [http://www. Wikipedia.org/](http://www.Wikipedia.org/) "Modernization". Diakses 1 April 2014.
- <http://www.wikipedia.org/>"Modernization Theory". Diakses 27 Juni 2014.
- Iskandar, Israr. 2004. *Perluasan Korupsi dan Modernisasi Politik*, (<http://israriskandar.wordpress.com/perluasan-korupsi-dan-modernisasi-politik/>), diakses pada 15 Desember 2013.
- Nenytriana. 2011. *Modernisasi Politik Gelombang Ketiga*, (<http://Nenytriana.Wordpress.Com/2011/11/14/Modernisasi-Politik-Gelombang-Ketiga/>) diakses pada 15 Desember 2013.

- NN. 2008. *Modernisasi Politik*, (<http://ceny95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik/>), diakses pada 15 Desember 2013.
- NN. 2009. *Dampak Positif Dan Dampak Negatif Globalisasi Dan Modernisasi*, (<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/dampak-positif-dan-dampak-negatif.html>), diakses pada 15 Desember 2013.
- NN. 2009. *Pengertian Modernisasi*, (<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-modernisasi.html>), diakses pada 15 Desember 2013.
- Wikipedia. 2013. *Modernisasi*, (<http://id.wikipedia.org/wiki/Modernisasi>), diakses pada 15 Desember 2013.
- Wrahatnala, Bondet . 2013. *Dampak Modernisasi*, (<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/08/dampak-modernisasi.html>), diakses pada 15 Desember 2013.